

Analisis Sikap Elite Politik Lokal Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Kota Manado

EFVENDY SONDAKH

Abstrak : Pelaksanaan PILKADA secara langsung ternyata bukan tanpa masalah. Pemilihan Kepala Daerah yang telah diselenggarakan selama ini ternyata cukup banyak mendapat tantangan internal

penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penentuan informan secara purposif didasari pula oleh alasan subjektif yang memiliki keterbatasan dana, waktu dalam melakukan penelitian ini Hasil Penelitian menunjukkan Umumnya Elite dan masyarakat Kota Manado telah mengetahui bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Harus ada Sosialisasi yang mendalam dari pemerintah dalam hal ini adalah KPUD terhadap pelaksanaan PILKADA di Kota Manado serta peran serta Elite dan partai politik yang ada di Kota Manado.

Kata Kunci : Sikap Elite Politik Lokal, Pemilihan Kepala Daerah

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan bagian terpenting dari demokrasi di Indonesia disamping Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Dengan diselenggarakannya pesta demokrasi langsung tersebut dapat di pandang sebagai adanya kelenturan atau fleksibilitas pemerintah reformasi menjawab tuntutan masyarakat tentang perlunya suatu sistem pemerintahan yang memberi peran lebih besar kepada masyarakat di Daerah, yaitu suatu sistem pemerintah yang tidak sentralistis. Demokrasi adalah kata yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan, karena membutuhkan kedewasaan berpolitik serta sarana dan prasarana yang terdukung mantap. Harahap

dalam Manajemen Dan Resolusi Konflik Pilkada (2005:103) mengatakan bahwa demokrasi adalah proses menuju peradaban yang baik. Oleh karena itu membangun demokrasi berarti membangun peradaban itu sendiri.

Pada jaman sekarang ini demokrasi menjadi populer dan hampir diterima secara universal karena dianggap sebagai sistem politik yang baik dalam memajukan kemanusiaan. Demokrasi atau pemerintahan demokrasi berkaitan erat dengan faktor yang umum dikenal dewasa ini seperti; adanya sistem perwakilan, adanya pemilihan umum secara berkala, adanya keterbukaan dan adanya pengawasan sosial (*social Cotrol*) dari rakyat atau masyarakat, Demokrasi juga dapat dikatakan sebagai “pemerintahan dari

bawah”, “pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat”, “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” atau “pemerintahan oleh orang banyak”. Adapun yang dimaksud dengan “bawah” disini adalah rakyat yang dalam hal ini adalah sebagian besar atau mayoritas mempunyai suara untuk ikut menentukan serta mempengaruhi proses perumusan kebijakan pemerintah melalui saluran-saluran yang disediakan untuk itu pada peringkat infrastruktur politik.

Berdasarkan filosofisnya, Budiarto (1993) mengungkapkan bahwa demokrasi berkembang di Yunani kuno pada abad ke 6 (enam) sampai abad ke-3 (tiga) s.M. Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi langsung (*direct democracy*) yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota di daerah sekitarnya serta jumlah penduduk yang sedikit (300.000) penduduk dalam satu negara kota). Lagipula ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga

negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung melainkan perwakilan. (*representative democracy*)

Harahap (2005:104) mengartikan demokrasi sebagai rakyat itu sendiri karena demokrasi adalah proses politik yang dilakukan rakyat untuk menata kehidupannya dalam sebuah masyarakat dan bangsa. Berdasarkan pengertian tersebut maka penulis beranggapan bahwa sudah sepantasnya ada penguatan demokrasi lokal (daerah) sebagai konsekuensi penerapan prinsip nyata dalam pemberian otonomi yang telah berlaku di Indonesia.

PILKADA dilaksanakan sebagai upaya mendemokratisasikan kehidupan berbangsa-bernegara di tingkat lokal. Penumbuhan demokrasi tingkat lokal ini merupakan ikhtiar untuk mencari pemimpin lokal yang memiliki legitimasi kuat, demokratis dan representatif. Sebuah pengalaman berdemokrasi yang jika dilihat dari pluralitas negeri kita tampak merupakan pesta demokrasi yang sarat beban.

Secara teoritis semangat demokratis tidak sepenuhnya tertampung secara eksplisit. Pasal (56) UU No. 32 Tahun 2004

dan Pasal (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, misalnya menandakan pasangan calon hanya dapat diajukan oleh parai politik atau gabungan partai politik.

Berbagai konflik sebelum dan sesudah PILKADA bisa saja terjadi hanya karena disebabkan oleh hal mendasar, yaitu ideologi atau agama. Faktor ideologi biasanya amat krusial karena melibatkan keyakinan tertentu. Pluralitas dan keseimbangan jumlah penganut agama di daerah tertentu bisa menjelma menjadi petaka jika faktor non agama ikut bermain. Faktor primordial seperti agama memang sensitif sekaligus membelah soliditas masyarakat di suatu daerah. Dibutuhkan kearifan dan kecerdasan lokal agar pluralitas agama serta warna ideologi tidak menjadi petaka kemanusiaan. Masalah diatas merupakan imbas dari konflik pada tingkat Elite yang ternyata menyerempet berbagai warna ideologi pada suatu daerah. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan Sadu Wasistiono (2003:18) “Konflik pada tingkat Elite Politik akan berimbas pada konflik horisontal tingkat akar rumput, yang pada akhirnya meimbulkan gangguan ketentraman atau bahkan sampai pada gangguan keamanan”. Untuk itu dibutuhkan suatu kearifan dan kecerdasan lokal untuk

menghindari setiap gesekan yang dapat menimbulkan konflik horisontal.

Dari Pemerintah Kota Manado, PILKADA akan dilaksanakan tahun 2015 yang akan datang. Itu berarti Pemerintah Kota Manado masih memiliki waktu yang dikatakan cukup panjang untuk mempersiapkan diri menyambut pesta demokrasi lokal tersebut. Melihat berbagai fenomena yang terjadi saat ini maka tentunya Pemerintah Kota Manado harus benar-benar matang dalam mempersiapkan diri, mengingat berbagai macam kendala seperti tersebut diatas, maka tentunya Pemerintah Kota Manado harus benar-benar tanggap akan kondisi yang ada dalam masyarakat Kota Manado.

Timbulnya berbagai masalah dan konflik sebelum dan sesudah pelaksanaan PILKADA tersebut maka selayaknya mengundang gugatan yang diarahkan kepada sang Elite. Yaitu, mesti ada yang salah dikalangan Elite, sehingga menimbulkan murka di kalangan massa. Konflik politis dapat berkembang menjadi konflik sosiologis, kelompok massa yang saling berhadapan membela Elitenya masing-masing. Massa pertama yang dimobilisasi umumnya dari kalangan yang kalah. Ada kemarahan dan kekecewaan yang dapat membakar massa. Suhu konflik

meningkat jika diladeni oleh kelompok lawan. Dalam keadaan seperti itu maka eskalasi konflik susah untuk dikendalikan. Meski secara umum konflik terjadi masih terbatas gerakan yang dimotori oleh kandidat yang kalah. Sementara calon terpilih biasanya menyerahkan kepada peradilan yang berwenang untuk memutuskan.

Akar konflik sosiologis mempunyai sejarah panjang di negeri ini. Pluralitas etnik dan agama menjadi kekayaan sekaligus masalah yang terus menghantui. Konflik PILKADA adalah salah satu pemicunya. Konflik ini dapat terjadi di wilayah yang komposisi demografinya berimbang. Konflik ini bersumber pada perbedaan identitas komunal yang dimanipulasi untuk kepentingan politik semata. Identitas komunal yang kuat memainkan peran penting sebagai identitas politik adalah agama dan etnis disamping itu tentu saja adalah identitas rasial dan golongan sosial ekonomi tertentu. Jika pemerintah gagal mengantisipasi dan mengelola konflik maka hal tersebut akan menjadi bom waktu bagi pemerintah karna akan mengagu stabilitas politik nasional yang disebabkan oleh proses politik dan partisipasi politik lokal yang diwarnai konflik berkembang tak terkontrol. Hal tersebut senada dengan yang

ditandaskan oleh Friedrich dalam Huntington (2005:31) bahwa “Masyarakat politik yang terorganisir jauh lebih adaptif dan lebih dapat menentukan keputusan dan mengembangkan kebijakan dibanding masyarakat yang tidak teratur”. Dari ungkapan tersebut tentunya menuntut kinerja pemerintah dan alat pemerintah dalam penyelesaian kendala yang ada.

Bertarung maju menjadi Kepala Daerah dalam pemilihan langsung adalah sepenuhnya bertarung merebut hari rakyat. Dalam hal ini tidak ada lagi politik dagang sapi dan tidak ada gunanya lagi politik uang. Karena uang diterima tetapi belum tentu sang calon yang memberi uang akan dicoblos di kotak suara. Pada akhirnya dibilik suara, hati nurani yang bicara.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung telah mulai dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 226 daerah akan melaksanakan PILKADA secara langsung pada tahun 2005 ini, yaitu 135 kabupaten, 80 kota dan 11 propinsi di seluruh Indonesia. Dengan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu Presiden maka Pemerintah dan Rakyat Indonesia memandang perlu untuk saat sekarang ini Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga dipilih secara langsung. Hal tersebut

dipandang sebagai suatu langkah maju sebuah demokrasi pada negara berkembang. Dalam demokrasi rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi. Dalam hal ini adalah Hak Pilih yang dimiliki oleh rakyat. Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Montesquieu dalam Noer (1999: 141) : Dalam demokrasi, rakyat berdaulat dalam hal tertentu, dan merupakan kawula (jadi tunduk) dalam hal lain. Tidak ada penyelenggaraan kedaulatan kecuali dengan hak pilih rakyat, yang merupakan kemauan sendiri dengan hak pilih rakyat, yang merupakan kemauan sendiri ; maka kemauan penguasa berdaulat adalah penguasa itu sendiri. Oleh sebab itu hukum yang menetapkan hak untuk memilih adalah dasar bagi pemerintah. Dan memang merupakan hak yang penting untuk mengatur dalam suatu republik bagaimana caranya, oleh siapa, untuk siapa dan mengenai apa, hak pilih itu diberikan.

Hal tersebut diatas merupakan bagian dari proses demokrasi yang mulai nampak dalam kehidupan politik sebagai akibat berbagai perubahan dalam sistem pemilu maupun UU Politik yang medasari aturan main dalam proses politik masa kini akan berpengaruh banyak dalam proses pemerintahan di daerah. Era pluralisme kepartaian telah dimulai dengan segala

konsekuensinya. Tidak ada kata mundur, tetapi belajar sambil berjalan. Harus dapat dipahami jika di awal era ini berbagai hambatan akan kita temui.

Pelaksanaan PILKADA secara langsung ternyata bukan tanpa masalah. Pemilihan Kepala Daerah yang telah diselenggarakan selama ini ternyata cukup banyak mendapat tantangan internal. Kerusakan yang terjadi selama ini telah mencoreng hitam wajah bangsa ini di negeri yang dipuji sebagai salah satu dari tiga negara demokrasi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Tetapi predikat hebat itu hilang seketika akibat berbagai masalah dan kerusakan yang terjadi sebelum dan setelah pelaksanaan PILKADA.

Gambaran tersebut diatas sangat diperlukan adanya penelitian lebih lanjut terhadap bagaimana Elite Politik Lokal menyikapi persiapan dan pelaksanaan PILKADA di daerah tersebut. Tentu, hal ini merupakan tanggungjawab Elite lokal yang ada, karna tidak mampu memberikan pelajaran Politik bagi rakyatnya. Kini terbukti bahwa Elite selama ini hanyalah mementingkan kepentingan pribadi dan golongan semata. Berkaitan dengan kepentingan pribadi ini maka Huntington (2005:32) mengatakan : Kepentingan pribadi selalu bersifat kepentingan jangka pendek.

Sedangkan kepentingan lembaga betapapun berlangsung sepanjang waktu; para pendiri setiap lembaga pasti pula mencanangkan sasaran jangka panjang dan selalu tidak terbatas. Alasannya adalah karena terbatas dan sempitnya semua kepentingan jangka pendek. Para pejabat berusaha untuk mengakumulir kekuasaan dan jumlah nilai dalam jangka pendek selalu berhadapan dengan kelemahan pelembagaannya dalam jangka panjang.

Melihat berbagai fenomena yang terjadi pada Elite yang memerintah selama ini maka menurut Thompson (2002:139) : Pejabat-pejabat yang memerintah menghadapi konflik antara kewajiban dan kebaikan orang-orang tertentu dan kewajiban demi kebaikan publik, kadang-kadang peran mereka mengizinkan atau bahkan menuntut tindakan-tindakan yang mungkin salah jika dilakukan. Senada dengan apa yang dikatakan Thompson maka Chilcote (2004:371) berpendapat bahwa kondisi yang terjadi selama ini pada Elite dan masyarakat dapat dikatakan sebagai krisis partisipasi, yang artinya konflik yang terjadi ketika elite memerintah memandang permintaan-permintaan dan perilaku individu-individu yang mencoba berpartisipasi dalam sistem politik sebagai tidak terlegitimasi sehingga menimbulkan

tekanan-tekanan kepada elite yang memerintah dan berakhir pada perubahan sikap dari Elite ataupun masyarakat tersebut.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, alasan mengapa penulis menggunakan metode kualitatif karena penulis hanya bermaksud untuk menganalisis serta memperoleh gambaran tentang Sikap Elite Politik lokal Kota Manado terhadap Pelaksanaan Pemilihan langsung Kepala Daerah di Kota Manado dan langkah strategis apa yang ditempuh untuk menciptakan PILKADA yang aman dan damai di Kota Manado serta Faktor apa saja yang menyebabkan konflik pada daerah yang akan dan telah melaksanakan PILKADA.

B. Sumber Data

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data (Arikunto S, 1998:107) mengklasifikasikannya menjadi 3 (tiga) yaitu : (1). *Person*, sumber data berupa orang, (2) *Place*, sumber data berupa tempat, (3). *Paper*, sumber data berupa symbol.

Menurut Lonfland dan lonfland (dalam Moleong, 2002:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-

kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain -lain. Sumber data tersebut dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *Vidio/audio tape*, pengambilan foto atau film,

Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

C. Informan

informan adalah pihak yang dapat memberikan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selain itu, penentuan informan secara purposif didasari pula oleh alasan subjektif yang memiliki keterbatasan dana, waktu dalam melakukan penelitian ini.

Dalam menggunakan sampel bertujuan (*puposive sample*) berdasarkan sifat penelitian kualitatif dalam penelitian ini yang berusaha mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya maka penelitian ini diharapkan lebih fleksibel sehingga penentuan jumlah sampel tidak ditentukan atau terbatas tapi seiring dengan berjalannya penelitian ini dapat bertambah jumlah dan jenisnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2004:156), Teknik pengumpulan data dapat dilakukan

dengan interview (*wawancara*), dokumentasi, dan gabungan keduanya.

- Dengan menggunakan wawancara terbuka dan tidak terstruktur diharapkan penulis memperoleh, mendapat, pandangan, serta pola pikir nara sumber terhadap masalah yang diteliti.
- Teknik dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data melalui dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses interpretasi data agar dapat ditafsirkan dan berguna dalam memecahkan masalah yang diteliti. Menurut Nasution (1998:35), analisis dilakukan sepanjang penelitian yang dilakukan secara terus - menerus dari awal sampai akhir penelitian.

Analisis data yang digunakan adalah berdasarkan langkah-langkah yang disarikan penulis dari Nasution (1998:129) sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, serta difokuskan pada hal-hal yang penting, agar memberi gambaran yang lebih tajam tentang data yang diperoleh.

2. Display Data

Peneliti dalam tahap ini melakukan penggolongan terhadap data yang

diperoleh berdasarkan bentuk, pola dan kualitas, untuk kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel serta uraian pernyataan agar gambaran data dapat dilihat secara keseluruhan untuk pengambilan keputusan.

3. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi
Setelah data tersaji dalam bentuk tabel maupun uraian pernyataan, maka dari data tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan dan diverifikasikan sesuai dengan variabel dan indikator yang telah ditentukan.

PEMBAHASAN

A. Sikap Elite Politik Lokal Terhadap Peran dalam Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Golongan Elite Politik lokal memainkan peranan yang sangat penting dalam seluruh proses perkembangan masyarakat. Masyarakat yang mempunyai golongan Elite fungsional dapat mencapai banyak kemajuan sedangkan pada masyarakat yang tidak begitu beruntung akan mengalami kesukaran untuk bergerak kearah pembangunan yang lebih maju. Oleh karena itu golongan Elite dapat dilihat dalam hubungannya berfungsi-tidaknya Elite terhadap seluruh proses perkembangan politik. Dalam kaitannya dengan PILKADA maka Elite politik yang ada di daerah tersebut mempunyai peran yang sangat

penting, dimana Elite yang ada di daerah tersebut dapat menjadi tolok ukur bagi keberhasilan pelaksanaan PILKADA. Elite juga merupakan tokoh yang harus diteladani, oleh sebab itu Elite politik harus menunjukkan sikap yang konsisten, baik itu pola pikir, pola sikap, maupun pola tindak. Sehingga tidak menjadi pemicu berbagai tindakan yang bersifat konflik terbuka yang memperlihatkan kepada publik secara telanjang, dan mengemukakan kepentingan kelompok tertentu.

Bagi Elite yang duduk dalam keanggotaan legislatif di daerah maka Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, telah diatur mengenai tugas dan wewenan DPRD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hal tersebut membuktikan bahwa peran Elite dalam pelaksanaan PILKADA di Daerah bebar-benar sangat menonjol. Oleh sebab itu diperlukan suatu bentuk dan kejelasan sikap dari Elite yang ada di Daerah untuk terciptanya suatu penyelenggaraan PILKADA yang diharapkan oleh masyarakat.

B. Pengetahuan Masyarakat Mengenai Posisi dan Kedudukan dalam Pemilihan Langsung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPUD Kota Manado tentang

pengetahuan masyarakat mengenai posisi dan kedudukan mereka dalam mekanisme pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat belum memahami dan mengetahui mengenai posisi dan kedudukan mereka dalam mekanisme pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh partai politik dan gabungan partai politik. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan Drs. Jama Mila Meha, selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Kelapa Lima dalam wawancara tidak terstruktur dengan penulis bahwa :

C. Harapan Masyarakat Terhadap Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diinginkan

Nampaknya pilkada langsung hanya dijadikan ajang perebutan kekuasaan, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk merebut suara pemilih. Ada indikasi kuat masing-masing kandidat menggunakan segala cara, termasuk yang dialrang seperti politik uang untuk mendapat dukungan. Mereka juga tidak segan-segan mengeksploitasi emosi masyarakat dan sentimen primordial untuk menarik simpati meskipun disadari bahwa cara itu kontradiktif terhadap perkembangan demokrasi. Banyak indikator yang menunjukkan bahwa pendekatan yang

digunakan para kandidat untuk mendekati masyarakat lebih menonjolkan pendekatan primordialisme. Hal itu tercermin dari ajakan untuk memilih dengan memakai sentimen kesukuan, agama, golongan dan wilayah tertentu. Dari berbagai spanduk dan poster yang dipampangkan juga tergambar sebuah klaim dukungan terhadap calon tertentu dengan memakai bendera komunitas tertentu.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan PILKADA nanti, Elite dan masyarakat Kota Manado sebenarnya telah mampu untuk menganalisa dan memahami seperti apa pelaksanaan PILKADA dan Elite serta masyarakat juga telah mampu untuk memilih yang terbaik bagi mereka, melalui analisa Politik dari masyarakat sendiri tanpa ditunggangi oleh Elite atau kepentingan partai atau golongan tertentu terhadap Elite atau rakyat dalam menggunakan haknya sebagai warga negara tetapi menurut pilihan hati nuraninya sebagai warga negara yang baik.

D. Faktor Agama dan Kemajemukan

Dalam berbagai kasus, unsur kemajemukan agama seringkali dituduh sebagai faktor pemicu atau bahkan penyebab terjadinya konflik sosial dan kekerasan kolektif. Tuduhan ini tidak sepenuhnya

salah, karena tidak sedikit kalangan yang menggunakan agama sebagai alat perjuangan dalam mencapai tujuan dan kepentingan politik. Politisasi agama merupakan hal yang mudah ditemui setiap kali ada kegiatan politik besar, seperti pemilu atau pemilihan ketua partai, bahkan ormas yang berbasis sosial-budaya. Hal serupa juga terjadi di kalangan internal agama itu sendiri sehingga berdampak pada retaknya hubungan atau terjadinya sekat-sekat pemisah diantara pemeluk satu agama. Sesungguhnya bukan ajaran agama yang menjadi faktor pemicu konflik tetapi lebih disebabkan oleh implementasi penganutnya yang salah dan menyimpang dari tujuan dasarnya. Penyimpangan ini bisa terjadi akibat penafsiran yang salah, baik sengaja atau tidak, atau karena politisasi untuk tujuan-tujuan di luar agama.

Kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan kenyataan sosial-politik yang harus disyukuri sebagai energi politik dalam mewujudkan masyarakat yang pluralistik dan demokratis. Oleh karena itu diperlukan *political will* dari pemegang kekuasaan yang sungguh-sungguh dan tulus dalam meletakkan infrastruktur politik yang mengakui pluralisme. Semua pihak seyogyanya memahami bahwa SARA selain berpeluang menciptakan konflik (dalam

iklim monolitik) tetapi juga dapat menjadi energi dalam mewujudkan proses demokrasi. Liberalisasi, demokrasi dan pluralitas politik adalah sebuah proses sosial yang tidak lari dari partikularitas yang pada gilirannya akan mendatangkan pendewasaan politik di tanah air.

E. Kesenjangan Ekonomi dan Struktural

Kesenjangan sosial-ekonomi dan ketidakadilan struktural merupakan faktor lain yang dapat menimbulkan konflik dan kekerasan kolektif. Dalam perspektif politik ekonomi keduanya sulit dipisahkan, meskipun secara akademik mudah dibedakan. Keduanya lebih sering disebut dan diuraikan dalam satu nafas dan pengertian, sebagai respon atas sistem atau struktur sosial yang menindas sehingga menimbulkan fenomena kesenjangan. Kesenjangan atau ketimpangan di sini diartikan sebagai kesenjangan yang eksploitatif sebagai akibat dari sistem atau struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil dan menindas. Kesenjangan yang terjadi sebagai suatu proses yang wajar dalam sistem sosial dan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil pihak, terutama penguasa kapital adalah sesuatu yang diterima sebagai keniscayaan. Kesenjangan dan ketidakadilan yang

disebabkan oleh struktur yang menindas dan timpang yang hanya menguntungkan sebagian kecil kalangan pemilik modal adalah kesenjangan yang sangat potensial melahirkan konflik sosial dan kerusuhan kolektif.

Persoalan kecemburuan sosial ini bukan hanya khas daerah perkotaan, tetapi juga terjadi di daerah terpencil. Hanya saja di daerah-daerah terpencil, seperti Papua, persoalan kesenjangan tidak kasat mata sebagaimana terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Lagi pula di daerah terpencil itu mekanisme sosial yang dilakukan untuk pemeratakan pendapatan masih berfungsi meskipun tidak optimal lagi. Namun bukan berarti kesenjangan dan kecemburuan sosial bukan lagi persoalan serius. Tingkatan kesenjangan yang melahirkan kecemburuan sosial itu tidak semata-mata diukur secara kuantitatif, tetapi ada ukuran-ukuran kualitatif yang hanya dipahami dalam konteks tata nilai lokal dan sistem sosial masyarakat daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu jangan heran jika ada suatu daerah yang tingkat pertumbuhan ekonominya relatif kecil dan daerah tersebut tergolong terbelakang, tetapi muncul gejolak sosial yang berakar pada faktor kecemburuan sosial yang berpadu dengan faktor etnisitas dan agama.

F. Konflik Antar Elite Politik Lokal

Sistem politik transisional juga dapat digunakan sebagai kerangka analisis. Masa transisi yang masih belum menunjukkan tingkat keamanan dari segi prosedur dan proses politik yang menyebabkan terjadinya gejala persaingan yang tidak sehat dan konflik politik dalam perebutan kekuasaan. Sistem politik transisi dengan demikian dianggap ikut memberikan peluang bagi terjadinya eksperimen politik yang berbeda-beda ditingkat lokal serta memberi peluang. Apalagi ada gejala hasil proses politik di tingkat lokal seringkali tidak diterima oleh masa yang kontra maupun pemerintah pusat. Gejala cacat hukum dari hasil proses politik di tingkat lokal seringkali tidak diterima oleh massa yang kontra maupun pemerintah pusat. Gejala cacat hukum dari hasil proses politik menunjukkan kecenderungan seperti itu. Bila hal ini dieksploitasi dengan menggunakan massa dengan berbagai tipe diatas, bisa berubah positif maupun negatif. Tetapi, realitas politik lebih menunjukkan distorsi dari proses politik yang dapat berubah menjadi konflik Elite dan konflik horizontal.

Konteks lokal perlu dipahami sebagai salah satu faktor terjadinya konflik kekuasaan. Ini dapat dilihat dari konteks

hubungan kultur dengan politik, hubungan organisasi massa dengan masalah politik, “ideologi politik” dimasing-masing daerah dan arah kecenderungan afiliasinya serta perilakunya, domografi politik dan lain sebagainya. Arena politik ini seringkali berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dalam konstelasi politik kekuasaan di tingkat lokal. Karena itu, konteks lokal juga dianggap penting pengaruhnya dalam sirkulasi “kekuasaan”, baik dalam bentuk dukungan politik maupun sikap politik masyarakatnya serta kepentingan-keperntingan kelompok yang dominan dalam konteks lokal seperti itu.

Mengenai dukungan politik ini, teori tentang jaringan kekuasaan bisa digunakan sebagai alat analisis, karena di dalamnya dapat menjelaskan mengania jaringan kekuasaan serta berbagai kepentingan di balik hubungan seperti itu. Dalam konteks jaringan kekuasaan ini, pemikiran tentang patron-klien, bisa juga dipinjam untuk memperkaya kerangka pemikiran dalam menjelaskan mengani aperebutan kekuasaan di tingkat lokal. Termasuk dalam konteks itu adalah adanya penjelasan mengenai broker-broker politik dalam konteks kekuasaan di tingkat lokal maupun hubungan secara kultural antara pemimpin dengan yang dipimpin. Pengaruh patron terhadap klien,

bisa juga untuk menjelaskan mengenai mengapa massa bertindak tertentu dalam konteks konflik kekuasaan dan tidak mencoba untuk kritis terhadap pengaruh Elite. Budaya masyarakat dalam konteks hubungannya dengan seorang pemimpin bisa memberikan pula dukungan analisis, bahwa dalam konteks tertentu sorang pemimpin dalam rangka mencapai kekuasaan bisa juga menggunakan makna-makna simblik kebudayaan, etnisitas dan lain sebagainya. Kerangka ini diperlukan sebagai upaya untuk menjelaskan menegani kaitan kepemimpinan lokal dalam hubungan sosial dengan massa mereka. Hubungan timbal balik politik inilah menyebabkan mengapa massa begitu militan dan mudah dimobilisasi serta memberikan dukungan penuh kepada Elitenya dalam proses perjuangan politik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisis Sikap Elite Politik Lokal terhadap Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung di Kota Manado, maka sesuai dengan masalah penelitian yang diangkat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Setelah mengadakan wawancara dan melalui pengamatan serta melihat pada data yang berasal dari pemerintah Kota

Manado maupun dari harian umum yang beredar di Kota Manado maka dapat dikatakan bahwa para Elite Politik yang ada di Kota Manado menyambut baik pelaksanaan PILKADA di Kota Manado nantinya.

2. Umumnya Elite dan masyarakat Kota Manado telah mengetahui bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat mengetahui bahwa proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada umumnya tidak jauh berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah dilaksanakan sebelumnya.
3. Harus ada Sosialisasi yang mendalam dari pemerintah dalam hal ini adalah KPUD terhadap pelaksanaan PILKADA di Kota Manado serta peran serta Elite dan partai politik yang ada di Kota Manado. Dengan adanya keleluasaan yang dimiliki oleh partai politik dalam menentukan sendiri pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka bisa berimplikasi pada tidak efektifnya proses pencalonan yang dilaksanakan dengan mekanisme verifikasi atau konvensi yang dilakukan partai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan secara umum pada poin pertama diatas maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Ada tindak lanjut dari sikap positif Elite lokal terhadap pelaksanaan PILKADA di Manado. Dalam hal ini Elite yang menjadi tolok ukur dalam masyarakat harus benar-benar menunjukkan etikat baik dari Elite dalam rangka pelaksanaan PILKADA nanti, baik dalam hal mekanisme pelaksanaan PILKADA sampai kepada menjalankan intrik-intrik politik dalam rangka merebut hati nurani rakyat yang tentunya bukan dengan jalan menghalalkan segala cara untuk tujuan dan maksud tersebut, tapi dengan berbagai langkah positif serta didukung oleh berbagai aspek penting dalam pengangkatan Kepala Daerah.
2. Pemerintah dan Elite lokal di Kota Manado harus menentukan berbagai langkah strategis yang mungkin dapat diambil guna terciptanya suatu pelaksanaan PILKADA yang diharapkan dan. Langkah-langkah antisipatif dan langkah strategis tersebut memungkinkan untuk diambil apabila adanya kesamaan tujuan dari Elite dan

pemerintah setempat sebagai pemegang peran dalam pelaksanaan PILKADA di Manado nantinya.

3. KPUD, DPRD dan institusi lain yang terlibat dalam proses PILKADA perlu lebih mengembangkan cara kerja yang fair dan akuntabel, ditunjukkan dengan perlibatan partisipasi publik secara luas dalam semua tahapan PILKADA, sejak pendaftaran pemilih, sampai rekapitulasi perhitungan suara. Maka, potensi konflik horizontal yang besar akibat ketidakpercayaan publik atas penyelenggara PILKADA bisa dihindari. Bagi para kandidat Kepala Daerah serta tim suksesnya diharapkan mampu memberikan contoh kepada pendukungnya sebagai sosok yang siap menang secara baik (*good winner*) sekaligus sosok yang siap kalah juga dengan cara-cara yang baik (*good loser*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Rajawali Pers Jakarta
- Ahmadi, Abu, dkk, 2002 Psikologi Sosial, Rineka cipta Jakarta
- Alwi, Aidit, AKSP Zainal, 1989, Elite Dan Modernisasi, Liberty, Yogyakarta.
- Apter, David, E. 1988, Pengantar Analisa Politik, LP3ES, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi, 1998 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Rineka Cipta, Jakarta
- Azed, Bari, Abdul dan Amir, Makmur, 2005, Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, FH, UI, Jakarta
- Azwar, Zaefudin, 2005, Sikap Manuisia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Bogdan, R and Taylor S, J 1975 Instruktion To Qualitative Research Methods, Jhon Wiley, New York
- Budiarjo, Miriam, 1993, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta
- Chilcote, Ronald, H, 2004, Teori Perbandingan Politik, "penelusuran paradigma, PT RajaGrafindo, Jakarta
- Douglas J, 1976, Anvestigative Social Research . CA Beverly Hills
- Gerungan, 1988, Psikologi Sosial, Penerbit Eresco, Bandung.
- Giroth, Lexie, M, 2004, High Education Pamong Praja, Global Governance and Open Society, CV Indraprasta, Bandung
- , 2005, Pamong Praja Kibernologi dan metakontrolologi Reorientasi dan Reinterpretasi Ilmu

- Pemerintahan, CV Indraprasta, Bandung
- Harahap, Asri, Abdul, 2005, Manajemen dan Resolusi Konflik PILKADA, PT Pustaka Cidesindo, Jakarta
- Huntington, P Samuel. 2004, Tertib Politik Pada Masyarakat yang sedang Berkembang, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Jhonson, DP, 1989, Teori Sosiologi 2, Penerbit, Gramedia, Jakarta
- Lincoln Y.S and Guba E.G, 1985, Naturalistic Inquiri, Sage Publication, Beverli Hills
- Mahendra A.A, Oka, 2005 PILKADA ditengah konflik horisontal, Gramedia, Jakarta
- Mashad, Dororudin, 2005, Konflik Antar Elite Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah, Pustaka Pelajar, Jakarta
- Mar'at, 1981, Pengukuran Sikap Manusia, Perubahan Serta Pengukurannya, Ghalia Indonesia, Bandung.
- Matthew B.M and Huberman A.M, 1992, Analisis data Kualitatif Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta
- Muller J, Daniel, 1992, Mengukur Sikap Sosial, Bumi Aksara, Jakarta.
- Miall Hugh, dkk, 2002, Resolusi Damai Konflik Kontemporer “menyelesaikan, mencegah, dan mengubah konflik bersumbar politik, sosial, agama dan ras” Rajawali Pers Jakarta
- Moleong, Lexi J, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mulyana, Deddy, 2001 “Metodologi Penelitian Kualitatif Paradikma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya, PT Remaja Rosda Karya, Bandung
- Nasution, S, 1998, Metode penelitian Naturalistik Kualitatif Penerbit, Tarsito, Bandung
- Nawawi, Hadari, 1985, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1987, Desain Riset dan Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah, Bina Aksara, Jakarta
- Noer, Deliar, 1999, Pemikiran Politik di Negeri Barat, Penerbit, Mizan, Bandung
- Prihatmoko, J, Joko, 2005, Pemilihan Kepala Daerah Langsung filosofi, sistem dan problema penerapan di Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta dan LP3M Semarang.
- Rakhmat, Jalaludin, 2005, Psikologi Komunikasi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung

- Rush, Michael dan Althoff, Phillip, 2005, Pengantar Sosiologi Politik, PT RajaGrafindo, Jakarta
- Sarundajang, S.H, 2005, PILKADA Langsung, Problema dan Prospek, Kata Hasta Pustaka, Jakarta
- Sarwono, Wirawan,Sarlito, 2004, Teori-Teori Psikologi Sosial, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan, 1989, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta
- Sorensen, Georg, 2003, Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan Prospek Dalam sebuah Dunia Yang Sedang Berubah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Surbakti, Ramlan, 1999, Memahami Ilmu Politik, PT Gramedia widia sarana Indonesia.
- Thompson, Dennis F, 2002 Etika Politik Pejabat Negara, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Varma, SP, 2003, Teori Politik Modern PT Raja Grafindo, Jakarta
- Wahab, Solichin, 1997, Analisis kebijakan dari formulasi ke Implementasi Kebijakan negara, Bumi Aksara, Jakarta
- Wasistiono, Sadu, dan Riyani Ondo, 2003 Etika Hubungan Legislatif Eksekutif, Fokusmedia, Bandung
- Winardi, J, 1992, Harga dan Penetapan Harga Dalam Bidang Pemasaran (Marketing), PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah